

Nama : Michael Jhoneven S Marpaung  
Nim : 240903104  
Mata Kuliah : Tata Kelola Sektor Publik  
Dosen Pengampu : Dr. R. Sally Marisa Sihombing S.I.P., M.Si.

---

**REVIEW BUKU ILMIAH**  
**COLLABORATIVE GOVERNANCE A NEW ERA OF PUBLIC POLICY IN AUSTRALIA?**

**BAB I: PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang: Krisis Model Hierarkis**

Pada awal abad ke-21, administrasi publik global menghadapi kebuntuan dalam menangani masalah-masalah yang bersifat lintas sektoral. Model birokrasi hierarkis klasik—yang didasarkan pada komando dan kontrol—sering kali gagal merespons "masalah pelik" (wicked problems) yang tidak memiliki definisi tunggal dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. John Wanna, seorang pakar administrasi publik dari Australia, mengidentifikasi bahwa era baru kebijakan publik menuntut pergeseran paradigma menuju "bekerja bersama" atau kolaborasi.

Di Indonesia tahun 2026, fenomena ini sangat terasa. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal (monopolis) dalam penyediaan barang publik. Sebaliknya, pemerintah bertindak sebagai agregator jaringan yang harus mengelola sumber daya milik pihak lain—baik swasta maupun masyarakat sipil—untuk menciptakan nilai publik yang lebih tinggi.

Laporan ini akan membedah bagaimana pemikiran Wanna yang ditulis dalam konteks Australia tahun 2008 tetap memiliki relevansi krusial bagi transformasi kebijakan di Indonesia saat ini.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Laporan ini disusun untuk:

- Melakukan tinjauan teoretis menyeluruh terhadap dimensi dan skala kolaborasi menurut John Wanna.
- Membangun argumen kritis mengenai risiko "Inersia Kolaboratif" dan pengaburan akuntabilitas.
- Menganalisis relevansi teori tersebut dengan data riset kebijakan publik di Indonesia tahun 2024–2026.
- Memberikan kerangka evaluatif bagi praktik kolaborasi lintas sektor di masa depan.

## **BAB II: REVIEW BUKU – BEDAH PEMIKIRAN JOHN WANNA**

### **2.1 Definisi dan Ontologi Kolaborasi**

John Wanna membuka bab pertamanya dengan mendefinisikan kolaborasi sebagai mekanisme "bekerja secara bersama-sama" atau "bekerja secara konjungtif" dengan orang lain. Secara etimologis, ia menggunakan istilah co-labouring, yang menyiratkan adanya upaya kolektif dari aktor otonom (individu, kelompok, atau organisasi) dengan syarat dan ketentuan yang sangat bervariasi.

Penting untuk dicatat bahwa Wanna membedakan antara kolaborasi sebagai kenyataan praktis (deskriptif-pragmatis) dengan kolaborasi sebagai komitmen filosofis (normatif-intrinsik). Dalam pandangan normatif, kolaborasi bukan sekadar alat manajemen, melainkan upaya untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan partisipasi.

### **2.2 Enam Dimensi Koordinasi dan Kolaborasi**

Berdasarkan pemikiran Wildavsky (1973), Wanna merinci kolaborasi ke dalam enam dimensi yang sering kali saling bersaing atau bahkan kontradiktif:

Kerja Sama (Cooperation): Upaya untuk menyelaraskan aktivitas aktor guna membangun kesamaan dan konsistensi.

Negosiasi (Negotiation): Proses tawar-menawar yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan melakukan pertukaran kepentingan (trade-offs).

Pengawasan (Oversight): Peran pengecekan pusat dan koordinasi untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan main.

Kekuasaan dan Paksaan (Power and Coercion): Kemampuan untuk memaksakan hasil melalui kepatuhan atau otoritas formal, meskipun dalam bingkai kolaborasi.

Komitmen Masa Depan: Perencanaan prospektif untuk menyinkronkan perilaku aktor di masa mendatang.

Keterlibatan (Engagement): Pengembangan motivasi internal dan komitmen personal terhadap tujuan strategis bersama.

## **2.3 Tangga Komitmen: Skala Kolaborasi**

Wanna menawarkan kerangka kerja "Tangga Kolaborasi" (Ladder of Collaboration) untuk mengategorikan tingkat aktivitas yang terjadi:

Tingkat Tertinggi (Integrasi): Melibatkan interaksi transformatif, pemberdayaan penuh pemangku kepentingan, dan pembangunan koalisi lintas sektor yang substantif.

Tingkat Menengah-Tinggi: Fokus pada keterlibatan kuat pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelimpahan kapasitas kepada mitra.

Tingkat Menengah: Komitmen formal untuk konsultasi antar-lembaga, strategi bersama, dan inisiatif pendanaan gabungan.

Tingkat Operasional (Rendah): Penyesuaian marginal melalui diskusi klien dan mekanisme umpan balik sederhana untuk "menyelesaikan pekerjaan".

## **2.4 Dinamika Sejarah dan Penggerak Utama**

Wanna mengidentifikasi tiga kategori penggerak kolaborasi hari ini:

Faktor Eksternal: Tekanan globalisasi, kemajuan teknologi informasi (IT), dan ancaman keamanan global seperti terorisme yang memaksa negara untuk berbagi intelijen.

Faktor Internal: Tuntutan politik agar birokrasi lebih responsif, ketergantungan pada penyedia kontrak pihak ketiga (outsourcing), dan fokus pada hasil (outcomes) daripada sekadar input.

Faktor Volisi (Keinginan): Strategi politik untuk membangun konsensus masyarakat dan keinginan pemerintah untuk melakukan "aktivisme kebijakan" baru, seperti layanan terpadu satu pintu.

### **BAB III: ARGUMEN REVIEW – ANATOMI INERSIA DAN DILEMA KEKUASAAN**

#### **3.1 Dilema Antara Keuntungan dan Inersia**

Argumen utama yang muncul dari ulasan Wanna adalah paradoks antara "Collaborative Advantage" (keunggulan kolaboratif) dan "Collaborative Inertia" (inersia kolaboratif). Keuntungan terjadi ketika sesuatu yang luar biasa dicapai melalui sinergi yang tidak mungkin dilakukan sendirian. Namun, inersia—di mana keluaran kolaborasi menjadi sangat lambat atau tidak ada sama sekali—adalah realitas yang lebih sering ditemui.

#### **3.2 Pengaburan Garis Akuntabilitas**

Wanna berargumen bahwa kolaborasi menantang model akuntabilitas tradisional. Dalam birokrasi formal, tanggung jawab bersifat tunggal (menteri bertanggung jawab kepada parlemen). Namun, dalam tata kelola kolaboratif, tanggung jawab menjadi berbagi (shared accountability). Hal ini menciptakan risiko "permainan saling menyalahkan" (blame game) ketika terjadi kegagalan, karena tidak ada garis otoritas yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas bagian mana dari proses tersebut.

#### **3.3 Paradoks Kepemimpinan: "Collaborative Thuggery"**

Kepemimpinan dalam kolaborasi sering kali dicitrakan sebagai proses yang lembut dan berbasis konsensus. Namun, ulasan kritis menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sering kali membutuhkan apa yang disebut sebagai collaborative thuggery—di mana pemimpin bertindak tegas (bahkan memaksa) untuk mengeluarkan aktor-aktor yang tidak berkontribusi atau menghambat kemajuan. Dilema ini menunjukkan bahwa tanpa otoritas yang kuat, kolaborasi hanya akan menjadi forum diskusi tanpa aksi nyata.

## **BAB IV: RELEVANSI DENGAN KONTEKS INDONESIA (2024–2026)**

### **4.1 Kolaborasi dalam Pendidikan Karakter: Program 7KAIH**

Pada awal 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti meluncurkan "Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" (7KAIH) sebagai pilar pendidikan karakter.

**Analisis Kolaboratif:** Sejalan dengan teori "Engagement" Wana, program ini menuntut kolaborasi intensif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keberhasilan pembiasaan seperti bangun pagi dan tidur cepat tidak mungkin dicapai tanpa sinergi empat pilar: keluarga, sekolah, masyarakat, dan media.

**Tantangan Praktis:** Riset menunjukkan hambatan utama datang dari faktor eksternal digital. Penggunaan gawai berlebih menjadi "gangguan" yang merusak ritme kolaborasi antara instruksi guru dan pengawasan orang tua di rumah. Survei 2025 menunjukkan bahwa 39% anak di Indonesia masih sulit bangun pagi, yang mengindikasikan rendahnya "komitmen masa depan" dalam ekosistem pendidikan kita.

### **4.2 Penanganan Stunting dan Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 adalah manifestasi dari "Tingkat Integrasi" tertinggi dalam tangga kolaborasi Wana.

**Model Pentahelix:** Penanganan stunting di daerah seperti Bekasi dan Pasangkayu melibatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah (Bappeda/Dinkes), akademisi (STIKES), dan dunia usaha melalui CSR.

**Risiko Ego Sektoral:** Sebagaimana diprediksi Wana tentang hambatan internal, implementasi MBG di beberapa daerah masih menghadapi kendala "wilayah kekuasaan" (turf ownership), di mana program internal dinas belum terharmonisasi secara baik dengan inovasi lintas sektor.

### **4.3 Dialektika Digital: Konektivitas dan Kesenjangan**

Transformasi digital di Indonesia (SPBE) mencerminkan penggerak eksternal IT yang disebut Wana.

**Divergensi Sosial:** Berdasarkan studi Digital Indonesia: Connectivity and Divergence, digitalisasi menciptakan jurang antara masyarakat urban yang adaptif dengan penduduk desa di daerah 3T yang masih harus memanjat pohon demi sinyal 2G. Kolaborasi data dalam kebijakan "Satu Data Indonesia" terhambat oleh disparitas infrastruktur dan kurangnya literasi

digital aparatur.

Erosi Perhatian: Generasi digital Indonesia saat ini memiliki rentang perhatian kurang dari 30 detik. Hal ini menuntut model kolaborasi yang lebih interaktif dan visual, meninggalkan cara-cara konvensional yang kaku.

## **BAB V: ANALISIS TANTANGAN STRATEGIS DI INDONESIA 2026**

### **5.1 Ketidakseimbangan Sumber Daya (Resource Asymmetry)**

Salah satu temuan kunci dalam penelitian terbaru di Indonesia adalah ketimpangan kekuasaan antar pemangku kepentingan. Pemerintah sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan karena kontrol anggaran, sementara aktor masyarakat sipil yang memiliki data lapangan sering kali terpinggirkan. Ini selaras dengan peringatan Wanna bahwa kolaborasi akan gagal jika partisipan merasa suara mereka tidak memiliki beban yang setara.

### **5.2 Hambatan Kultur dan Legitimasi Prosedural**

Kultur birokrasi Indonesia yang bersifat hierarkis dan kaku (Old Public Administration) sering kali bertabrakan dengan kebutuhan fleksibilitas kolaboratif. Tanpa adanya aturan main yang jelas dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau Rencana Aksi yang transparan, kolaborasi di Indonesia cenderung berakhir sebagai formalitas administratif tanpa dampak nyata.

### **5.3 Risiko Geopolitik dan Ekonomi**

Laporan Global Risks 2026 menyoroti fragmentasi sosial dan persaingan ekonomi global sebagai ancaman bagi stabilitas kebijakan. Di tingkat lokal Indonesia, masalah seperti manajemen sampah dan kemacetan lalu lintas menuntut perubahan perilaku kolektif yang sulit dicapai tanpa strategi "Nudging" yang didesain secara kolaboratif.

## **BAB VI: SINTESIS DAN REKOMENDASI STRATEGIS**

### **6.1 Kesimpulan**

Kolaborasi bukan lagi pilihan opsional, melainkan keharusan fungsional bagi pemerintah Indonesia tahun 2026. Review terhadap pemikiran John Wanna menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi menawarkan solusi bagi masalah kompleks, ia memiliki kerentanan tinggi terhadap inersia dan pengaburan tanggung jawab. Kasus program 7KAIH dan penanganan stunting di Indonesia membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat bergantung pada kepemimpinan fasilitatif yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan.

### **6.2 Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan**

Transformasi Kepemimpinan: Pejabat publik harus dilatih untuk beralih dari peran "Komando" menjadi "Fasilitasi" dan "Broker Jaringan".

Infrastruktur Digital Inklusif: Mempercepat pemerataan akses internet di wilayah 3T untuk memastikan kolaborasi data dalam SPBE tidak menciptakan ketimpangan layanan publik.

Insentif bagi Sektor Non-Negara: Memberikan pengakuan formal dan insentif ekonomi bagi dunia usaha (melalui CSR) dan komunitas lokal yang berkontribusi secara nyata dalam penyelesaian masalah publik.

Literasi Kolaboratif Keluarga: Penguatan peran orang tua sebagai mitra strategis sekolah dalam pendidikan karakter anak melalui edukasi penggunaan gawai yang bijak (prinsip 3S).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Akbar, M. (2025). Collaborative Governance sebagai Pengungkit Inovasi Smart City di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Khatulistiwa*, 10(2).
- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Tantangan Collaborative Governance dalam Implementasi SPBE di Indonesia Timur. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1).
- Artikel Penelitian dan Referensi Relevan (2024–2026):
- Aspinall, E., & Savirani, A. (2025). *Governing Urban Indonesia: Trends and Challenges*. Cambridge University Press.
- Haryani, D., & Sampurna, A. F. (2025). Penanganan Stunting melalui Collaborative Governance dengan Pendekatan Pentahelix di Kabupaten Bekasi. *PUBLIKAUMA*, 13(2).
- Jurriëns, E., & Tapsell, R. (Eds.). (2017). *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Kemendikdasmen. (2025). Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Jakarta.
- Mu'ti, A. (2026). Rekomendasi Bacaan Awal Tahun: Atomic Habits dan Relevansinya dengan 7KAIH. Medcom Pendidikan.
- Ridho, M. R. (2025). Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Repository IPDN.
- Santhet, J. (2025). Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility. *Jurnal Sejarah dan Humaniora*, 9(1).
- Tiyas, A. H., Hazin, M., & Supratno, H. (2025). Analisis Kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Wanna, J. (2008). Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes. Dalam J. O'Flynn & J. Wanna (Eds.), *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* (hlm. 3-12). Canberra: ANU E Press.
- World Economic Forum. (2026). *Global Risks Report 2026: The Age of Competition*. Geneva.